



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
UNIT KERJA : ANGGOTA BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : PURNOMO ANDIANTONO
- Jabatan : KEPALA KANTOR PERWAKILAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM
- NHK : 631316

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.440.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/224 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.040.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 46 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 190.500.000

- MOBIL, XPANDER MITSUBISHI Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 190.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.300.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 101.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 2.741.800.000**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.741.800.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.